

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin pesat. Perkembangan tersebut didasari oleh adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan ini mempunyai peran untuk menentukan nasib pemerintah daerah karena daerah tersebut akan menjadi daerah yang kuat dan mampu berkembang apabila daerah tersebut mampu mengelola keuangannya secara baik. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membuat keutuhan aset daerah terjaga. Dalam suatu otonomi daerah dapat dikatakan berhasil apabila hal tersebut tidak lepas dari kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri, sesuai dengan yang diharapkan, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan tersebut dilakukan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahunnya ditetapkan dengan peraturan daerah (PP 58 Tahun 2005, pasal 4)

Untuk mencapai suatu pemerintahan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tentunya pemerintah tersebut harus meningkatkan strategi dan kebijakan yang berfokus pada sektor-sektor strategis dan potensial. Selain itu, perlu juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan. Hal tersebut dilakukan secara berkala melalui sajian data statistik yang berkualitas.

Salah satu yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah adalah melalui laporan keuangannya. Pemerintahan dengan laporan keuangan yang baik akan menyajikan laporan keuangannya secara transparan dan tentunya tidak terdapat keganjilan dalam penyajiannya. Laporan keuangan dengan predikat baik adalah yang mempunyai opini wajar tanpa pengecualian. Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah dengan persetujuan DPR-RI telah menetapkan satu paket undang-undang di bidang keuangan negara :

1. UU No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.
2. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Investasi Pemerintah.

Ketiga undang-undang diatas menjadi dasar bagi institusi negara untuk mengubah pola administrasi keuangan menjadi pengelolaan keuangan. Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah menjadi salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggung jawaban kepala daerah berupa perhitungan APBD (Halim, 2012: 212).

Kinerja Keuangan Daerah merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat kemampuan suatu daerah. Bentuk penilainnya berupa analisis rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan

pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa laporan APBD (Halim, 2012: 212). Pengukuran kinerja keuangan dirasa sangat penting karena untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Mengingat bahwa akuntabilitas bukan sekedar kemampuan untuk menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efektif, efisien dan ekonomis (Mardiasmo, 2013: 182).

Tuntutan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan karena adanya masalah yang terjadi dalam manajemen keuangan daerah yaitu, masih tingginya proporsi anggaran untuk belanja tidak langsung, seperti gaji pegawai, dari pada belanja langsung, baik berupa dana pelayanan publik atau dana investasi yang terkait langsung dengan tujuan organisasi, sehingga mengakibatkan rendahnya nilai kinerja pemerintah di mata masyarakat. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah selain dapat dilihat dari aspek kinerja non-keuangan namun juga dapat dilihat melalui aspek keuangan. Gambaran kinerja keuangan dapat diketahui dengan melakukan analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka pada laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik (Mahmudi, 2016:89).

Penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Putri dan Darmayanti (2019) yang berjudul “Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali”

yang diteliti menggunakan metode penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Pendapatan asli daerah menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Sarbagita Provinsi Bali tahun 2012-2016 yang bermakna bahwa penerimaan kekayaan daerah berupa PAD oleh pemerintah daerah tidak serta merta dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Penerimaan PAD yang tinggi seharusnya diikuti dengan kinerja keuangan pemerintah yang baik.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Tamara (2018) yang berjudul “Pengaruh Kemakmuran Belanja Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2013-2016” penelitian ini menggunakan metode penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2013-2016. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah semakin tinggi pula pengawasan yang diberikan sehingga pemerintah daerah akan meningkatkan kinerjanya yang kemudian meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Mengacu dari dua penelitian sebelumnya, maka peneliti menentukan pada dua faktor yakni : pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan. Faktor pertama yang mempengaruhi kinerja keuangan

pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan, dimana PAD diperoleh dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD yang semakin meningkat diharapkan bisa memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Suatu pemerintah daerah mampu mencapai jumlah pendapatan daerah yang tinggi tentunya mempunyai ketersediaan jumlah kas yang cukup untuk melakukan pembiayaan kegiatan program kerja yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan, dengan demikian akan tercipta Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang baik. Semakin tinggi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat atau baik dalam membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah adalah dana perimbangan, dimana menurut Halim (2016) bahwa dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah, yang terdiri dari : Dana Bagi Hasil,

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan daerah adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan atau yang sering disebut dengan Dana Transfer ini mempunyai peranan yang penting terutama untuk mencapai efisiensi dan keadilan dalam penyediaan layanan publik. Dana Perimbangan mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yaitu semakin tinggi dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah semakin tinggi pula pengawasan yang diberikan sehingga pemerintah daerah akan meningkatkan kinerjanya yang kemudian meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Ini berarti bahwa semakin tinggi dana perimbangan maka kinerja keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya semakin kuat tetapi apabila dana perimbangan rendah maka kinerja keuangan daerah untuk membiayai segala kebutuhan daerahnya juga semakin rendah.

Pengukuran kinerja merupakan alat bagi manajemen untuk menilai keberhasilan organisasi. Dalam organisasi sektor publik, keberhasilan organisasi dinilai dari kemampuan organisasi yang dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan murah (Halim dan Kusufi, 2012). Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya (Hony, 2013). Selain itu dapat juga digunakan sebagai

tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah (Kamaroellah, 2017). Pendapatan yang diterima dalam APBD akan digunakan untuk membiayai kebutuhan daerahnya, dan diharapkan pendapatan tersebut akan terus meningkat secara signifikan tiap tahunnya.

Pengelolaan APBD yang baik harus memperhatikan kepentingan publik maka realisasi dan pengalokasian dana terhadap program-program maupun berbagai kegiatan yang dibiayai akan memberikan manfaat yang besar sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan publik akan pelayanan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan publik. Akan tetapi dalam perkembangannya masih terdapat permasalahan dalam sistem pengelolaan terhadap APBD. Dalam realisasinya, APBD masih dikritik oleh masyarakat karena banyak terjadi pemborosan dana (*mark up*), kebocoran dana publik/korupsi, dan program-program maupun kegiatan yang tidak layak secara ekonomis. Untuk itu laporan APBD perlu dievaluasi optimalisasinya terhadap alokasi anggaran apakah telah berjalan secara ekonomis, efektif dan efisien (*value for money*) demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah, kinerja pemerintah sangat penting untuk dilihat dan diukur. Keberhasilan suatu pemerintahan dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya. Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi pemerintah. Pengelolaan anggaran berdasarkan kinerja ini memberikan gambaran yang lebih khusus terkait dengan kemampuan suatu daerah untuk selalu menggali potensi daerah guna meningkatkan anggaran pendapatan, yang akan berdampak pada kemampuan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam anggaran berbasis kinerja secara struktur meliputi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian kinerja keuangan pemerintah yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan.

Dikutip dari Yasin (2019) di Jawa Tengah sendiri realisasi pendapatan itu cukup baik, namun kemandirian keuangan daerah harus terus digenjot. Berbagai upaya kreatif mesti diimplementasikan untuk mencapai target pendapatan dan mendorong kemandirian keuangan. Jawa Tengah sendiri masih sangat ketergantungan terhadap dana transfer pusat ke daerah dalam bentuk dana perimbangan. Terdapat banyak sektor yang dapat dioptimalkan, seperti intensifikasi pajak daerah atau retribusi daerah, optimalisasi pendapatan daerah melalui pinjaman penerbitan obligasi. Selain itu juga optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan melalui kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga,

maupun optimalisasi kekayaan daerah yang dipisahkan melalui penyertaan modal/ investasi ke BUMD.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa belum optimalnya pemanfaatan kekayaan daerah dan masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat, dan jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangannya belum bisa dimaksimalkan maka akan berpengaruh pada kualitas kinerja keuangan itu sendiri yang menyebabkan pengelolaan kemandirian keuangan daerah itu belum baik. Akibatnya kehidupan sosial masyarakat belum sejahtera (Suryaningsih, 2015). Padahal Jawa Tengah sendiri termasuk provinsi yang kinerja keuangannya sudah baik namun belum bisa memaksimalkan kekayaan daerahnya belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017 dan 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 dan 2018 ?

2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 dan 2018?

1.3 Batasan Masalah

1. Penelitian ini hanya meneliti tentang Pendapatan Daerah dan Dana Perimbangan di kabupaten/ kota di Jawa Tengah.
2. Dana Perimbangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dana perimbangan yang mempunyai unsur Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
3. Penelitian ini hanya menggunakan 2 tahun anggaran yaitu tahun 2017 dan 2018

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 dan 2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 dan 2018.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan yang berguna bagi berbagai pihak yang berkepentingan yaitu:

1. Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat mengevaluasi hasil kinerja dari pemerintah berdasarkan perhitungan rasio dan analisis hasil penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk kinerja satuan kinerja perangkat daerah di pemerintah daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 dan 2018 agar meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat.

2. Bagi pihak investor dan masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan hasil kinerja pemerintah daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 dan 2018 dalam mengoptimalkan potensi - potensi yang ada.

3. Bagi Penulis

Penulisan ini berguna dalam menambah wawasan penulis dan dapat menjadi referensi dan data tambahan dalam mengembangkan penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.

4. Bagi Universitas

Untuk memperoleh masukan tentang informasi mengenai kualifikasi sarjana yang dibutuhkan di dunia kerja dalam rangka peningkatan mutu lulusannya, serta sebagai alat evaluasi terhadap kurikulum yang digunakan. Selain itu penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematik penulisan skripsi dibagi dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang membahas latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi acuan teori dalam analisa penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran adalah permasalahan yang akan diteliti dan pengembangan hipotesis adalah dugaan yang disimpulkan dari landasan teori dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang menjelaskan penelitian dilakukan secara operasional. Pada bagian ini diuraikan tentang metode penelitian berupa jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan definisi operasional. Kemudian metode analisa data memuat penjelasan mengenai cara dan langkah-langkah sistematis pengolahan data. Selain itu menjelaskan alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan merupakan bagian yang menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil sesuai dengan teknik analisis yang digunakan.

BAB V PENUTUP

Penutup merupakan bagian terakhir yang menjelaskan tentang kesimpulan berisi penyajian secara singkat dari hasil pembahasan, saran dan keterbatasan penelitian.